

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

### B. Buku

- Algra, dkk., 1983, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta
- Boedi Harsono, 2003 *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Effendi Peranginangin, 2007, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht, Culemborg*, Uitgeverij LEMMA BV
- Hadjon Philipus M., 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Harsono Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Jayadi Setiabudi, 2015, *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya*, Penerbit Buku Pintar, Yogyakarta
- Jimly Asshiddie dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Paulus Efindie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya

- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sri Mahmudji dan Soejono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia.
- Sutedi Adrian, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Yanly Gandawidjaja, 2002, *Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah*, Universitas Katoli Parahyangan, Bandung

### C. Jurnal

- Cecyllia Tamara B dan Hanafi Tanawijaya, *Perbuatan Maladministrasi dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dan Akibat Hukumnya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel)*, *Jurnal Hukum Adigama*,
- Djoko Poernomo, 2006, *Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Surabaya, Tesis, PPS Universitas Airlangga
- Fayakundia Putra Sufi, *Pemisahan Jabatan Pejabat Umum di Indonesia*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22, No. , Tahun 2017, Edisi September

- Hendry Dwicahyo Wanda dan Rusdianto Sesung, 2018, *Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C*, Jurnal, Universitas Narotama Suarabaya
- I Gusti Bagus Yoga Prawira, Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.IV, No.1, April 2016
- Jimly Asshiddiqie, “Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Jurnal Renvoi*, Vol. 3, Juni 2003.
- M. Syahrul Borman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.3, No.1, Februari 2019
- Made Anggara Giri, 2013, Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Hadapan Camat Sebagai PPAT Sementara Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, *Jurnal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Marlo Gustia, Penerapan Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.IV, April 2016
- Marlo Gustia, Penerapan Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.IV, April 2016
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Solechan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2, Issue 3, Agustus 2009
- Tri Febriana Dhea & Sulaiman Ahars, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT”, *Jurnal Petita*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.
- Yoga Prawira I Gusti Bagus, “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah”, *Jurnal IUS*, Vol. 4, No. 1, April 2016.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pertanahan

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah

#### **E. Internet**

<http://www.academia.edu.com>

<http://www.amiyorazakaria.blogspot.com>

<ps://pelayananpublik.id>

<https://ombudsman.go.id/artikel/>

<https://media.neliti.com/media/>